

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM Mendukung SDGs Desa Di KABUPATEN LAMONGAN

Mahfudhoh¹ dan Yeni Selfia²

¹Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan, Jl. Raya Deandlesh
KM. 72 Paciran-Lamongan.

Email: mahfudhoh.78@gmail.com

²Dosen Fakultas Teknik dan Rekayasa Universitas Selamat Sri Kendal, Jl. Soekarno Hatta
KM. 03 Kendal-Jawa Tengah.

Email: yenisefiaa@gmail.com

ABSTRAK

Program pembangunan berkelanjutan desa atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrument untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan Kuantitatif melalui Community Based Reseach, data yang digunakan skunder, sumber pustaka dan riset-riset terdahulu tahun 2021 dan 2022. Model pengolahan data menggunakan pola clustering data menggunakan *software Orange*. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa peran BUMDes dalam mendukung SDGs Desa memiliki andil dalam lima(5) komponen SDGs Desa, meliputi: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata(8), Desa Tanpa Kesenjangan(10), Desa Damai Berkeadilan(16),Kemitraan untuk Pembangunan Desa (17) dan, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Keterkaitan tersebut menunjukan pertumbuhan ekonomi kabupaten Lamongan mengalami kenaikan sebesar 5,46 persen tahun 2022 dari tahun sebelumnya 2021 sebesar 3,43 yang bersumber dari aktifitas PDRB dan kegiatan ekonomi desa. Sedangkan 4 komponen SDGs lainnya juga mengalami kenaikan seperti Rasio Gini, kemitraan investasi. Namun pada komponen desa damai berkeadilan menjadi naik sebesar 83,63 persen naik 93,44 persen. Komponen keragaman dan kekayaan budaya Lamongan secara historis masih sangat terlihat kental dan rapi dengan sentuhan modernisme. Perlu rekonseptualisasi peran BUMDes untuk memaksimalkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa yang compatible dan culturabile dalam upaya mendukung SDGs Nasional.

Kata kunci: SDGs Desa, Badan Usaha Milik Desa, Pemangku Kepentingan.

ABSTRACT

Village sustainable development programs or Village Sustainable Development Goals (SDGs) and Village Owned Enterprises (BUMDES) are one of the instruments to improve the economy in rural areas. The position of BUMDES has not been fully regulated in legislation and local government policies. This research uses qualitative and quantitative methods through Community Based Research, data used is secondary, library sources and previous research in 2021 and 2022. The data processing model uses a data clustering pattern using Orange software. The results of data processing show that the role of BUMDES in supporting the Village SDGs has contributed to five(5) Village SDGs components, including: Equal Village Economic Growth(8), Village Without Gaps(10), Peaceful Village with Justice(16), Partnership for Village Development (17) and, Dynamic Village Institutions and Adaptive Village Culture. This linkage shows that the economic growth of the Lamongan district has increased by 5.46 percent in 2022 from the previous year 2021 of 3.43 which comes from GRDP activities and village economic activities. Meanwhile, the other 4 SDGs components also experienced an increase, such as the Gini Ratio, investment partnerships. However, the peaceful village component with justice increased by 83.63 percent, an increase of 93.44 percent. Historically, the components of diversity and richness of Lamongan culture are still very thick and neat with a touch of modernism. Need to reconceptualize the role of BUMDES to maximize Village Sustainable Development Goals (SDGs) that are compatible and culturabile in an effort to support the National SDGs.

Keywords: Village-owned enterprises, Village SDGs, Stakeholders. Pemangku Kepentingan.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 SDGs (Sustainable Development Goals) di Indonesia telah di sepakati untuk mendorong pembangunan yang lebih baik di Indonesia. SDGs Nasional berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Terdapat aktor penting untuk mensukseskan SDGs Nasional guna mendorong pembangunan wilayah pedesaan di Indonesia. Pengembangan Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDes) dinilai dapat mewujudkan program-program pembangunan berkelanjutan desa atau dikenal dengan SDGs.

Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Hardijono dan kawan (2014), pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di wilayah pedesaan. Sayangnya sampai saat ini kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes. Pertumbuhan ekonomi desa yang seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan dalam negara-negara berkembang dinilai masih nampak jelas. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: a) Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan b) *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan upaya perencanaan pembangunan yang sudah disepakati bersama (Rustiadi, Ernani 2022).

Salah satu bentuk dan upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi

dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan desa dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014). BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47

Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Kondisi tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik ke pemerintahan maupun sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Sebagai unit terkecil dari negara, desa secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki 74.093 desa (Badan Pusat Statistik, 2020), dimana lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal (Susetiawan, 2020). Salah satu strategi untuk menanggulangi hal ini adalah mewujudkan kewirausahaan desa dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh komunitas masyarakat desa untuk merubah kondisi sosial pedesaan (Ansari, 2013). Terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2015 menghendaki adanya desa yang mandiri dan otonom dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dimana BUMDes diharapkan berperan dalam peningkatan perekonomian pedesaan (Prabowo, 2014).

Pada konteks yang lain, desa juga dianggap masih memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, modal sosial desa lebih besar daripada modal ekonomi. Modal sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat terbatas, menjadi modal sosial yang paling dangkal dan tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya mengkaji lebih mendalam tentang peranan BUMDes untuk mensukseskan SDGs Desa di Indonesia, SDGs Desa yang sudah tercapai dan apakah dibutuhkan rekonseptualisasi peran BUMDes di

Indonesia. Sebagai sampling dipilih secara strategis peran BUMDes yang berada di Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.

METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 27 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 462 Desa. Luas wilayah 1.812,8 km² atau 3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur dengan garis pantai sepanjang 47 km. Berikut Gambar 1 Lokasi Penelitian.



Sumber: Lamongan.go.id

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara dengan aktor terkait. Aktor yang dimaksud adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruh seperti pengelola BUMDes dan kelompok usaha bersama (KUB).

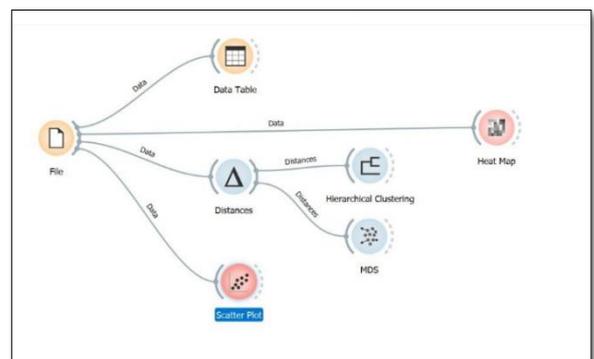
Data sekunder berupa studi kepustakaan dengan penelaahan buku, jurnal, laporan resmi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemerintah Kabupaten Lamongan, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu (1) *metode Community Based Research* dengan dilakukan tahapan penelitian dalam beberapa tahap, yaitu: *in-depth interview* dengan partisipan yang menjadi aktor kunci

dalam BUMDes dan (2) metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2010) dengan menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisa data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Teknik analisis data *mining orange* dengan menggunakan aplikasi orange. Input data yang digunakan yaitu data tabel yang terdiri dari 5 aspek yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data pertumbuhan penduduk, data gini rasio, data angka kriminalitas, dan data kemitraan Kabupaten Lamongan tahun 2021 hingga tahun 2022. Kemudian akan dihubungkan pada *widget* sesuai dengan *tool* apa yang akan digunakan sehingga menampilkan design *widget text clustering* seperti yang terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2 . Design Widget Text Clustering

Pada Gambar tersebut diatas adalah proses pengolahan data skunder yang mennggunakan software Orange sesuai sumberdata skunder yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BUMDes untuk Mewujudkan SDGs Desa Pengembangan BUMDes dinilai akan dapat mewujudkan program-program pembangunan berkelanjutan desa atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menyebut setidaknya BUMDes dapat menjadi instrumen untuk mencapai lima program SDGs Desa.

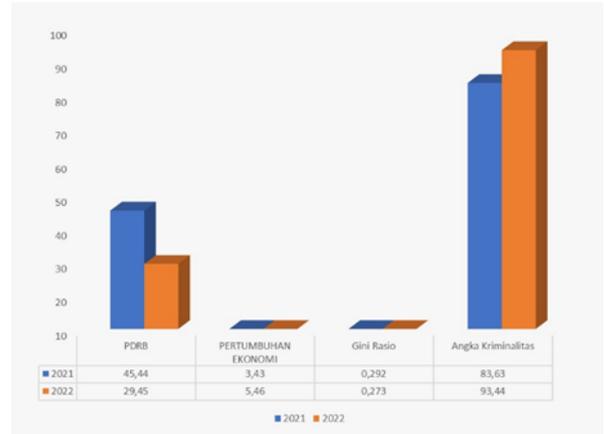
Pertama, SDGs Desa kedelapan yaitu pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa atau

pertumbuhan ekonomi desa merata. Kedua, SDGs Desa kesepuluh yaitu desa tanpa kesenjangan. Ketika pertumbuhan ekonomi melalui BUMDes sudah terwujud, maka kesenjangan harus diantisipasi. Ketiga, SDGs Desa keenam belas yaitu desa damai dan berkeadilan. Aspek keadilan yang dapat diwujudkan oleh BUMDes yaitu keadilan ekonomi tidak ada kesenjangan yang jauh antara kaya dan miskin. Keempat, SDGs Desa ketujuh belas yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. Pada poin ini, BUMDes diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan BUMN, pemerintah daerah, hingga swasta. Kelima, SDGs Desa kedelapan belas yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Artinya inovasi-inovasi di desa dilakukan dengan tetap berupaya berpijak dan bertumpu pada budaya dan adat istiadat di desa yang sudah berjalan dengan bagus, namun terus berupaya melakukan inovasi baru agar terjadi percepatan dan peningkatan di dalam desa danarganya.

SDGs Desa yang Sudah Tercapai di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan analisis ketercapaian SDGs Desa di Kabupaten Lamongan dapat dilihat dari 5 tujuan SDGs yang telah ditetapkan oleh Kemendes PDTT. Pertumbuhan ekonomi desa merata (tujuan 8) di Kabupaten Lamongan yaitu terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,03 % dari tahun 2021 (3,43%) menjadi 5,46 % di tahun 2022.

Desa tanpa kesenjangan (tujuan 10), terjadi penurunan angka gini rasio sebesar 0,019 yang artinya semakin rendah, maka tingkat kesetaraan juga semakin tinggi di Kabupaten Lamongan. Desa damai berkeadilan (tujuan 16), peningkatan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Lamongan hampir setiap hari tidak lebih dari 12 jam 46 menit 1 detik tersebut mencapai 9,8 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Keterkaitan BUMDES dan SDGs Desa pada tujuan 1 sd 3 Tahun 2021-2022 di Kabupaten Lamongan.

Kemitraan untuk pembangunan desa (tujuan 17) di Kabupaten Lamongan menunjukkan jumlah proyek terus meningkat dari tahun 2018-2022. Meskipun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan dan kenaikan di tahun 2016-2022, namun Penanaman Modal Asing (PMA) terus meningkat dari tahun 2017-2022. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 4.

Tahun/Year	Proyek/Project	Tenaga Kerja/Workers	PMA/Foreign Investment	PMDN/Domestic Investment	Non Fasilitas/Non Facility
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2016	1.151	5.739	-	1.151.551	487.228
2017	1.038	17.090	2.692.000	351.628	821.656
2018	895	2.876	2.649.536	128.336	837.893
2019	912	8.945	60.000	146.385	767.015
2020	1.251	17.862	2.502.500	261.650	1.179.952
2021	1.385	16.142	1.938.886	374.133	822.323
2022	1.543	12.482	5.552.097	158.156	820.038

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lamongan

Gambar 4. Tren Investasi (Domestik/Asing) di Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022.

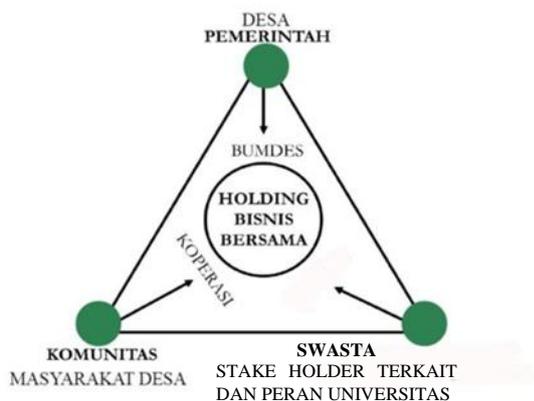
Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif (tujuan 18) di Kabupaten Lamongan telah memiliki Peraturan daerah (Perda) No. 12 Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 12 Peraturan Daerah (Perda) tentang inovasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan desa telah ditata dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Lamongan.

Keragaman dan kekayaan budaya Kabupaten Lamongan secara historis terbagi menjadi 2 wilayah sesuai karakteristik budaya dan kesenian yaitu (1) Wilayah Selatan yang kental dengan budaya Jawa, dan (2) Wilayah Utara yang sangat dominan dan monumental dengan budaya Islam (Budaya Pesisir).

Konseptualisasi BUMDes untuk Mendukung SDGs Desa di Kabupaten Lamongan

Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mendorong peran BUMDes untuk mewujudkan SDGs Desa. Perbedaan pendekatan program pada masing-masing pihak selama ini, selain karena faktor ego sectoral, juga untuk menjaga “trust dan Safe” program perlu diminimalisis.

Dengan adanya kolaborasi, selain akan meningkatkan asset sumber daya juga menjaga keberlanjutan dan dampak yang luas bagi masyarakat. Konseptualisasi BUMDes untuk mendukung SDGs Desa di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Konseptualisasi BUMDes untuk mendukung SDGs Desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran BUMDes

berdasarkan SDGs Desa pada tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi desa merata), tujuan 10 (desa tanpa kesenjangan), tujuan 16 (desa damai berkeadilan), tujuan 17 (kemitraan untuk pembangunan desa), dan tujuan 18 (kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif).

BUMDes dalam upaya mendukung SDGs Desa di Kabupaten Lamongan terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap: pertumbuhan ekonomi (tujuan 8), tingkat kesejahteraan (tujuan 10), menciptakan kemitraan (tujuan 17) dan tingkat inovasi daerah/desa (tujuan 18). Namun, mengalami kenaikan pada tingkat kriminalitas (tujuan 16) sebesar 9,8% tahun 2022 dari 83,63 % ditahun 2021. Adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan (Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta) dapat mendorong peran BUMDes untuk mewujudkan SDGs Desa.

REKOMENDASI

Berpegang pada temuan dan simpulan maka riset ini perlu mencatat rekomendasi penting bagi peneliti, akademisi, masyarakat, dan pemerintahan setempat antara lain adalah:

1. Dibutuhkan penguatan stakeholder dan kapasitas aparatur desa untuk peningkatan pengembangan ekonomi dan pengelolaan program-program desa berbasis ekonomi.
2. Disamping penguatan ekonomi desa, perlu perbaikan infrastruktur desa (jalan, transportasi, sarpras ekonomi) dalam mempermudah dan mendukung ekonomi desa.
3. Peningkatan kesadaran bersama (aparatur dan masyarakat) bahwa tidak selamanya dana desa hanya untuk infrastruktur, perlu ada pergeseran ke pengembangan ekonomi sesuai potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, (2016). Kelembagaan Desa dan Kewirausahaan Desa. Yogyakarta: YKPI.
- AW. Widjaja. 2009. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ajzen, I., dan Fishbein, M. (2005). *The Influence Of Attitudes On Behavior. The Handbook Of Attitudes, Lawrence Erlbaum Assosiaciates.* <https://scholar.google.com>. 22 Desember 2020 (15:22).
- Akmalia, R.A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penggunaan E-Commerce Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Pengusaha Perak Di Kotagede Yogyakarta. *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda.* 4(1), 116-125.
- Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF).* 3(2), 21-30.
- Bhattacharjee, A. (2000). Acceptance Of Internet Aplication Services: The Case Of Electronic Brokerages. *IEEE Transactions On Systems, Man, and Cybernetics Part A: Systems and Human* 30(4): 411-420. [https://www.scirp.org/\(S\(i43dyn45teexjx455qti3d2q\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=854110](https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qti3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=854110). 22 Mei 2023 (15:50)
- Prasetyo, Ratna Azis. (2016). Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Sosiologi Dialektika,* VL:11.
- Qodir, Abdul. (2011). Analisis Kelembagaan Dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia